

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mendapatkan kinerja optimal diperlukan suasana kerja dan hubungan antar pihak dalam organisasi yang selaras dan serasi. Hubungan ini dapat tergambar dari praktek tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan berfokus pada bagaimana cara semua pihak didalam perusahaan, termasuk didalamnya *stakeholders*, untuk memastikan manajer dan orang yang berasal dari dalam perusahaan lainnya senantiasa memiliki alat ukur yang jelas atau mengadaptasi mekanisme untuk menjaga *interest stakeholders* (Waseem, 2011).

Secara umum, tata kelola perusahaan merupakan suatu struktur yang diterapkan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan terus meningkatkan kinerja dengan didasari oleh perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Sebagaimana yang dijelaskan oleh *Forum of Corporate Governance Indonesia* (2016) bahwa definisi *Good Corporate Governance (GCG)* menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.

Pada tahun 1998, Bozz-Allen-Himilto melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks *corporate governance* paling rendah, dengan skor 2,88 jauh dibawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand

(4,89). Rendahnya kualitas GCG di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan belum dikelola secara benar dan belum menjalankan tata kelola perusahaan.

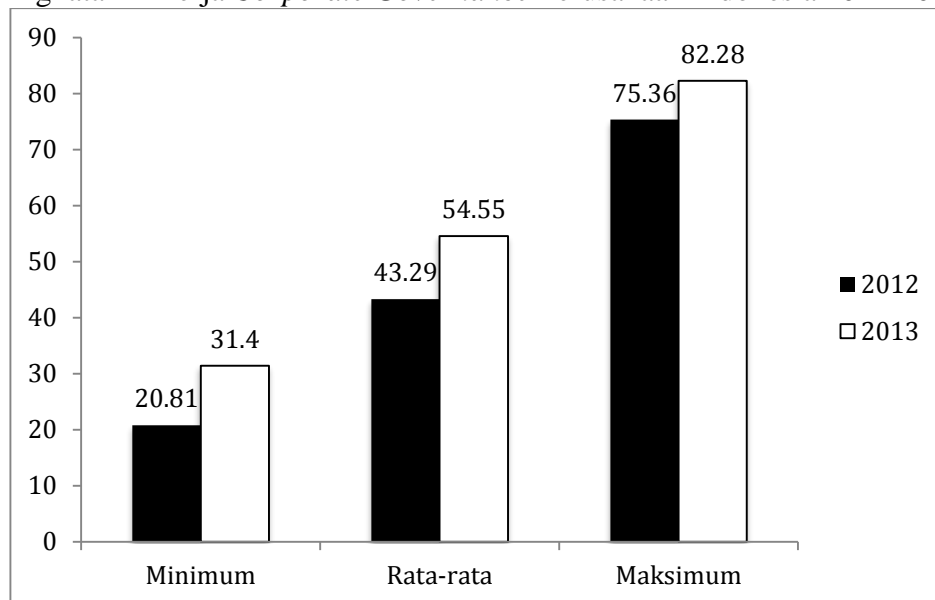
Tata kelola perusahaan menjadi masalah yang vital bagi kesejahteraan, tidak hanya bagi pemilik dan pemegang saham perusahaan, tetapi juga meliputi pekerja dan orang-orang yang berada dimasyarakat secara keseluruhan. Penerapan tata kelola perusahaan sekarang menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan.

Pada tahun 2000-an tuntutan untuk penegakan tata kelola yang baik semakin besar. Masyarakat Transparansi Indonesia bersama dengan para ahli dan pihak terkait lainnya membentuk lembaga swasta yang melakukan riset, mensosialisasikan konsep, praktik, manfaat dan pemeringkatan terhadap pengimplemantasian GCG kepada dunia usaha. Lembaga tersebut antara lain, *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD)*, *Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI)*, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), LKDI (Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia) dan sampai akhirnya pada tahun 2011 terbentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua lembaga diatas bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pratek *corporate governance* yang baik.

Adanya lembaga-lembaga tersebut diatas jelas membantu untuk penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia, dibuktikan dengan penelitian selanjutnya pada tahun 2014 mengenai perbandingan peningkatan kinerja *corporate governance* yang dilakukan oleh ADB.

Gambar 1.1

Peningkatan Kinerja *Corporate Governance* Perusahaan Indonesia 2012-2013



Sumber : ADB (2014)

Dari hasil penelitian tersebut Indonesia mengalami peningkatan yang positif pada 2012-2013 tetapi jika dibandingkan dengan dengan negara lain seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam dan Thailand, Indonesia masih berada pada level rendah. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan *Press Release Risk And Governance Summit 2014*, “*Passion to Governance: Implementing Strategy into Action*” yang diterbitkan oleh OJK, *Global Fraud Survey (2014)* menjelaskan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya seperti penelitian tahun-tahun sebelumnya tetap menjadi sektor terbesar dimana *fraud* terjadi. Dengan demikian maka kesadaran untuk penerapan tata kelola perusahaan secara efektif di industri jasa keuangan perlu dilakukan secara lebih sistematis, terus menerus, menunjukkan manfaat nyata, implementatif, dan tidak hanya ditataran konsep atau peraturan lagi, jauh secara

spesifik diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri untuk perbankan *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau instansi terkait yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan merupakan peraturan yang harus diterapkan pada setiap perbankan. Ditambah lagi dengan adanya OJK pada 2011 yang memiliki otoritas atas sektor jasa keuangan di Indonesia secara legal.

Tidak ada perlakuan istimewa untuk perbankan tertentu, sehingga semua bank seharusnya memiliki penerapan tata kelola perusahaan yang sama. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keinginan terciptanya kondisi yang sehat dan juga operasional yang baik meskipun di dalam industri memiliki ukuran perusahaan yang berbeda. Berangkat dari perbedaan tersebut akan cenderung menciptakan budaya, efektifitas kerja, dorongan finansial, minat investor dan tentunya mekanisme tata kelola perusahaan yang berbeda pula. Mekanisme tata kelola perusahaan tentunya sangat penting karena mempengaruhi tingkat *competitive advantage* berujung pada kinerja perbankan itu sendiri.

Penelitian mengenai mekanisme tata kelola perusahaan dan kinerja telah banyak dilakukan. Tetapi belum menjadi umum ketika melihat lebih dekat bagaimana ukuran perusahaan dan *gender diversity* mempengaruhi hubungan antara keduanya secara lemah atau lebih kuat. Ukuran perusahaan cenderung menggambarkan nilai perusahaan. Ketika ukuran perusahaan semakin besar kecenderungan untuk mendapatkan peluang pertumbuhan akan setara, selain itu perusahaan akan cenderung lebih diperhatikan oleh masyarakat. Dilain hal *gender diversity* bisa mempengaruhi kinerja dikarenakan perdebatan cara pandang terhadap kemungkinan perubahan dan gaya kepemimpinan dalam perusahaan. Secara subjektif kebanyakan orang menganggap bahwa wanita cenderung menggunakan perasaan, terstruktur dan juga rapi dalam bekerja sementara itu pria cenderung berusaha untuk berfikir lebih objektif dalam bertindak sehingga terlihat lebih tenang.

Melihat kondisi tersebut, maka penulis tertarik melihat lebih dekat apakah ada pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta melihat pengaruh moderasi *gender diversity* dan ukuran perusahaan dengan melakukan penelitian berjudul: **Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terhadap Kinerja Bank** (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Priode 2011-2015)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh mekanisme tata kelola bank dengan kinerja perbankan di Indonesia yang meliputi mekanisme pemantauan kepemilikan, mekanisme pemantauan pengendalian internal, mekanisme pemantauan regulator dan mekanisme pemantauan pengungkapan?
- b. Apakah *gender diversity* pada dewan komisaris memoderasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan?
- c. Apakah ukuran perusahaan memoderasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja perusahaan, meliputi mekanisme pemantauan kepemilikan, mekanisme pemantauan pengendalian internal, mekanisme pemantauan regulator dan mekanisme pemantauan pengungkapan dalam industri perbankan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apakah tingkat keanekaragaman pada dewan komisaris memoderasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan Indonesia.
- c. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memoderasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

a. Bagi Perbankan

Mengetahui mekanisme *Good Corporate Governance* pada perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum dan juga membantu direksi menjabarkan kerangka dalam menetapkan kebijakan ataupun keputusan strategik.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan analisis yang baik tentang perbandingan mekanisme *Good Corporate Governance* pada industri perbankan Indonesia. Serta, memberi kontribusi sebagai bahan kajian dan referensi untuk penelitian sejenis.

c. Bagi Praktisi

Dipraktekkan dan dipertimbangkan sebagai salah satu sarana perusahaan untuk mencapai kinerja perusahaan yang tinggi sesuai dengan harapan sehingga bisa menjadi kiblat dalam standar prosedur yang memiliki kualitas yang tinggi sehingga tercapainya keunggulan kompetitif.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab II menjelaskan mengenai tinjauan literatur yang menjadi dasar penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, defenisi operasional variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian berupa gambaran umum perusahaan sampel, analisis data serta pembahasan hasil penelitian dan intrepetasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, saran dan implikasi.